

**IMPLEMENTASI PROGRAM DANA AMANAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SENONI
KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

**Berliana Hardinda Putri Pratiwi, Aji Ratna Kusuma, Cathas Teguh
Prakoso**

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 1, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara

Pengarang : Berliana Hardinda PP

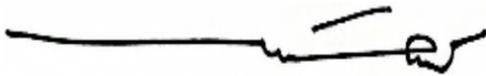
NIM : 1502015051

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP. 19590308 198403 2 001

Samarinda, 30 Januari 2023

Pembimbing II,

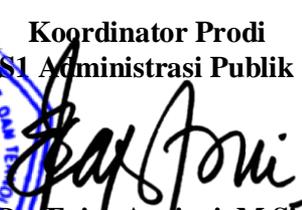


Dr. Cathas Teguh Prakoso, S.Sos., M.Si
NIP. 19741120 200501 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Prodi S1 Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si NIP. 19830414 200501 2 003
Volume	: 11	
Nomor	: 1	
Tahun	: 2023	
Halaman	: 126-135	

IMPLEMENTASI PROGRAM DANA AMANAH PEMBERDAAAN MASYARAKAT DI DESA SENONI KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**Berliana Hardinda Putri Pratiwi¹, Aji Ratna Kusuma², Cathas Teguh
Prakoso³**

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode “Kualitatif Deskriptif”. Metode penelitian di fokuskan pada implementasi, evaluasi dan faktor penghambat dari program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di Desa Senoni. Tehnik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini nara sumber/key informan adalah Ketua Pelaksana Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di Desa Senoni, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara masih adanya Anggota Peminjam yang melakukan tunggakan dan terdapat keluhan dari Anggota Peminjam terkait kurangnya informasi, kemudian SDM yang dirasa cukup dengan rata-rata Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta masih adanya pemberian dana pinjaman kepada orang-orang terdekat dari Anggota Pelaksana, serta monitoring yang tidak dilakukan sesuai dengan operasional prosedur. Sehingga pada pelaksana dilapangan belum bisa dikaakan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun faktor-faktor penghambat dalam Implementasi DAPM di Desa Senoni yaitu adanya Anggota Peminjam yang tidak melakukan pengembalian dana pinjaman dengan tepat waktu, dan kurang tegasnya Anggota Pelaksana dalam memberikan teguran dan pemberian sanksi terhadap Anggota Peminjam yang menunggak.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Dana Amanah, Pemberdayaan Masyarakat*

¹ Mahasiswa Program S1 Admistrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: berlianhardindah@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Kemiskinan di Indonesia dapat digambarkan dengan kondisi jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan) pada bulan maret 2018 mencapai 25,95 juta orang atau 9,82 persen (BPS, Maret 2018). Permasalahan utama dalam pengetasan kemiskinan di Indonesia saat ini yaitu terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara Bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai pudar. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan pemerintah sangat berperan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, perlu adanya kegiatan pembangunan di Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat melalui upaya penanggulangan dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi.

Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan mulai tahun 2007 untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerje di wilayah-wilayah pedesaan. PNPM Mandiri telah berkembang diantaranya berhasil menyediakan dan memberikan akses pinjaman dana bergulir bagi masyarakat miskin produktif berbasis kelompok terutama bagi kaum perempuan, sehingga menjadi sumber pendapatan tambahan dan penciptaan lapangan kerja. Pinjaman dana bergulir tersebut dikelola oleh masyarakat melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Perdesaan dan Unit Pengelola Keungan (UPK) PNPM Perkotaan yang kemudian disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM).

Salah satu desa yang menjadi sasaran pelaksanaan program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah Desa Senoni. Desa Senoni terdair 3 dusun dan 17 RT dengan luas 4300 H, yang mempunyai jumlah penduduk 2.058 jiwa dengan kategori sangat miskin 207 jiwa (10%), miskin 761 jiwa (37%) dan tidak miskin 1.090 jiwa (53%). Untuk mengentaskan masalah dari Sebagian masyarakat miskin dan sangat miskin perlu adanya bantuan dana yang sekiranya dapat digunakan sebagai modal usaha mereka. Yang mana program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) tersebut diharap dapat membantu meningkatkan perekonomian dari sebagian masyarakat Desa Senoni.

Namun pada kenyataannya berdasarkan observasi yang penulis lakukan secara langsung di desa tersebut, pelaksanaan program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Senoni diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada saat program tersebut sedang berjalan.

Dari uraian permasalahan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam implementasi program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara ?

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implementasi kebijakan secara sederhana yaitu pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Widavsky dalam Usman (2004:7) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Selanjutnya menurut Friedrich dalam Wahab (2012:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Jadi kesimpulan dari pengertian implementasi kebijakan public adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tujuan yang ditetapkan.

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh Edward III dalam Agustino (2008:149-154) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tuuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (pertransmisian-informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2. Sumber daya, merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Edward III dalam Agustino (2008:151-152). Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
 - a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
 - b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
 - c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata public tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
 - d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
3. Disposisi, variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi, menurut Edward III dalam Agustino (2008:152-154), adalah:
 - a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
 - b. Insentif salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka

sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat diartikan suatu proses menuju berdaya, atau proses dalam memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. (Sulistiyani, 2017:77).

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkekuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena pokok dari pemberdayaan berdekatan dengan konsep mengenai kekuasaan. Terkadang kekuasaan selalu berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang dia inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Suharto (2014:57) Seringkali pemberdayaan ditujukan kepada orang-orang ataupun kelompok yang lemah dan tak berdaya agar mereka mempunyai kekuatan atau kemampuan dalam, (a) memenuhi kebutuhan primer dan memiliki kebebasan, yakni terlepas dari kelaparan, kebodohan dan terlepas dari kesakitan, (b) meningkatkan pendapatan dengan adanya sumber-sumber produktif yang terjangkau, (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan dimana mereka harus terlibat dalam suatu penyelesaian masalah.

Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harta dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Mandiri yang dimaksud disini adalah mandiri dalam berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan keadaan yang dialami masyarakat dengan ditandai adanya kemampuan dalam berfikir, memutuskan ataupun melakukan sesuatu yang dipandang tepat dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif,

psikomotorik, efektif, dengan penerahan sumber daya dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. (Sulistiyani, 2017:80)

Dapat disimpulkan tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat menjadi mandiri melalui proses belajar secara perlahan akan memperoleh kemampuan atau daya dari masa ke masa.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori-teori yang mendukung konsep yang ada maka secara konseptual yang dimaksud dengan Implementasi Program Dana Amanah Pemberdayaan (DAPM) adalah pelaksanaan atau penerapan program yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Desa Senoni yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan pada makna. Sumber dan jenis data penelitian menggunakan pemilihan informan melalui metode *Purposive Sampling* dengan sumber data primer Kepala Pelaksana Program DAPM Desa Senoni (*Key Informan* atau Informan Kunci), Anggota Peminjam DAPM (Informan Pendukung) dan sumber data sekunder yaitu Dokumen-dokumen terkait Program DAPM Desa Senoni dan Profil Desa Senoni. Sedangkan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif. (Miles dkk, 2014)

Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.

Berikut fokus penelitian yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Implementasi program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di Desa Senoni berdasarkan model implementasi dari George C Edward III yaitu : Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi
2. Faktor penghambat yang dihadapi dalam mengimplementasikan program DAPM di Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Senoni

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah dana milik masyarakat yang berasal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dikelola oleh masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan

berbasis pemberdayaan masyarakat. Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di Desa Senoni belum berjalan dengan baik dikarenakan komunikasi yang dilakukan Tim UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) tergolong kurang efektif terbukti dengan kurangnya informasi yang diterima oleh anggota peminjam mengenai sanksi atau sistem pengembalian dana pinjaman. Dalam melakukan Strategi Komunikasi Tim UPK kurang mengikuti buku panduan Strategi Komunikasi (Strakom) DAPM.

Salah satu aspek penting lainnya untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Sumber daya merupakan kekuatan atau unsur yang paling utama sebagai pendukung setiap organisasi, agar unsur-unsur tersebut dapat memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Secara umum dapat disimpulkan kemampuan sumber daya di Desa Senoni baik sumber daya aparat dan fasilitator dikategorikan belum cukup baik, artinya bahwa sumber daya manusia atau kemampuan yang dimiliki oleh aparat Desa Senoni belum cukup menunjang berhasilnya implementasi kebijakan DAPM, dengan didukung oleh latar belakang pendidikan, meskipun banyak yang hanya lulusan SMA namun pemerintah memberikan pembinaan terhadap para implementor agar tidak kesulitan dalam menjalankan program dan dapat menjalankan program dengan baik dan sesuai petunjuk teknis operasional DAPM.

Disposisi merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan dan komitmen kemungkinan besar melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan. Kesimpulan yang didapatkan bahwa sikap (disposisi) para Anggota Pelaksana Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Desa Senoni belum sesuai dengan prosedur yang ada. Para Anggota Pelaksa masih mementingkan orang-orang terdekat untuk mendapatkan dana pinjaman. Hal ini mengakibatkan adanya kecemburuan sosial diantara masyarakat Desa Senoni, yang mana seharusnya para Anggota Pelaksana bersikap adil dan memberikan dana pinjaman berdasarkan data perekonomian masyarakat Desa Senoni.

Struktur birokrasi maupun prosedur operasional yang menjadi pedoman bagi UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yaitu monitoring/pengontrolan masih dilaksanakan setengah-setengah, yang mana ada aturan yang harus dipatuhi yang tertuang dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) yang menjadi pedoman setiap yang ada di dalamnya untuk bertindak. Apabila dukungan masyarakat dalam pelaksanaan seimbang dengan aturan yang telah ditetapkan maka hasil yang akan diperoleh pasti akan memberi dampak yang positif.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Program DAPM

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sejumlah factor penghambat dalam Implementasi Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat. Adapun factor penghambat pertama adalah ada beberapa warga yang tidak melakukan

pengembalian dana pinjaman di karenakan dana tersebut tidak dipergunakan untuk modal usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Gambar LPJ UPK Kecamatan Sebulu

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UPK T.A 2019
PER 31 DESEMBER 2019**

Modal Awal UPK		Rp	1.405.500.000
Modal Awal UPK pertanggal 31 Desember 2019		Rp	3.545.789.682
Perkembangan Modal			Rp 2.140.289.682
Surplus Tahun Berjalan T.A 2019		Rp	181.272.859
Nasabah yang dilayani :			
a. Kelompok	48	Kelompok	
b. Pinjaman pribadi	84	Orang	
Saldo Pinjaman		Rp	1.738.864.500
Tunggakan		Rp	430.014.600
1	Desa Senoni	Rp	107.407.200
2	Desa Selerong	Rp	103.422.900
3	Desa Sanggulan	Rp	73.133.200
4	Desa Giri Agung	Rp	36.461.200
5	Desa Beloro	Rp	35.119.300
6	Desa Segihan	Rp	29.074.500
7	Desa Tanjung Harapan	Rp	19.166.600
8	Desa Sebulu Modern	Rp	17.256.100
9	Desa Sumber Sari	Rp	16.813.300
10	Desa Manunggal Daya	Rp	7.400.000
11	Desa Mekar Jaya	Rp	6.650.000
12	Desa Sebulu Ilir	Rp	6.184.000
13	Desa Sebulu Ulu	Rp	-
14	Desa Lekaq Kidau	Rp	-

Sumber: LPJ Kecamatan Sebulu Tahun 2020

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Desa Senoni mempunyai tunggakan keseluruhan sebesar Rp. 107.407.200,00 yang merupakan total keseluruhan dari 58 anggota peminjam yang tidak melakukan pengembalian pinjaman tepat waktu. Berdasarkan data yang penulis dapat, diketahui bahwa sebagian Anggota Peminjam menggunakan modal awal dari dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana dapat menimbulkan terhambatnya pengembalian dana pinjaman pada tanggal yang sudah ditentukan. Faktor penghambat berikutnya adalah kurang tegasnya para Anggota Pelaksana dalam memberikan peringatan dan teguran kepada Anggota Peminjam yang menunggak atau belum melakukan pengembalian, kemudian teguran dan pemberian sanksi tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur hal tersebut dapat memberikan dampak kepada Anggota Peminjam sehingga mengesampingkan pelunasan atau pengembalian dana pinjaman. Seharusnya Anggota Pelaksana wajib mengingatkan dan memberikan teguran kepada Anggota Peminjam yang mengalami tunggakan atau belum melakukan pengembalian.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data hasil penelitian dan pembahasan hasil yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Desa Senoni dapat dikatakan belum cukup berhasil, hal ini dapat diketahui dari adanya tunggakan pembayaran dana pinjaman yang mengakibatkan kemacetan dari program tersebut. Yang mana berdasarkan implementasi program DAPM di Desa Senoni masih mengalami berbagai hambatan
 - a. Komunikasi yang dilakukan Tim UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) tergolong kurang efektif terbukti dengan kurangnya informasi yang diterima oleh anggota peminjam mengenai sanksi atau system pengembalian dana pinjaman.
 - b. Kemampuan sumber daya di Desa Senoni baik sumber daya aparat dan fasilitator dikategorikan belum cukup baik, artinya bahwa sumber daya manusia atau kemampuan yang dimiliki oleh aparat Desa Senoni belum cukup menunjang berhasilnya implementasi kebijakan DAPM.
 - c. Sikap para Anggota Pelaksa masih mementingkan orang-orang terdekat untuk mendapatkan dana pinjaman.
 - d. Struktur birokrasi maupun prosedur operasional yang menjadi pedoman bagi UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yaitu monitoring/pengontrolan masih dilaksanakan setengah-setengah.
2. Faktor-faktor penghambat implementasi program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Desa Senoni antara lain : Anggota peminjam yang tidak melakukan pengembalian dana, serta teguran dan sanksi yang diberikan anggota pelaksana tidak dilakukan sesuai prosedur.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya ditemukan beberapa kendala terkait implementasi Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Desa Senoni Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka saran-saran yang dapat penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Adanya anggota peminjam yang tidak tepat waktu dalam pengembalian pinjaman, dimana dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Yang mana seharusnya bagi Anggota Peminjam, dana pinjaman digunakan untuk membuka atau mengembangkan usaha agar anggota peminjam dapat melakukan pengembalian pinjaman tepat waktu persetiap bulannya, sehingga tujuan dari adanya dana pinjaman dapat tepat sasaran yaitu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat Desa Senoni.
2. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Pelaksana terhadap anggota peminjam yang mana diharapkan agar pengembalian pinjaman dapat berjalan lancar. Bagi Anggota Pelaksana sebaiknya melakukan pengawasan

pengembalian dana pinjaman sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga para anggota peminjam memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap pengembalian dana pinjaman.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2012. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI
- Ambar, Teguh Sulistyani. 2017. *Kemitraan Dan Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Dokumen Usulan Perguliran Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019
- Edward III, George C. (1980). *Implementating Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- LPJ Kecamatan Sebulu Tahun 2019
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (Edition 3)*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjejep Rohindi, UI-Press.
- Pedoman Umum Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011
- PNPM Mandiri Paket Informasi 2012-2013
- Standar Operasional Prosedur DAPM tahun 2019
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*, Malang : Banyuwangi.
- www.pnpm-mandiri.or.id (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018)
- www.walisongo.ac.id. Annisa Nayyrotur Riswah. Pengaruh Pelaksanaan Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Khasanah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Diakses pada tanggal 28 September 2019
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.